YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4912

PERAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

The Role of Development Communication in Infrastructure Development in Konawe Kepulauan Regency

Hado[1], La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy[2], Taziruddin[3], Mahdar[4], Syaifudin Suhri Kasim[5]
[1]Universitas Sulawesi Tenggara; [2]Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe Kepulauan; [3]Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tenggara; [4]Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara; [5]Universitas Halu Oleo
hasinaunsultra@gmail.com, ichwanlaode@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 4, 2025	Jan 19, 2025	Jan 31, 2025	Feb 5, 2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of development communication in village infrastructure development by the Lamongupa Village Government, Wawonii Tengah District, Konawe Kepulauan Regency. The main focus of this research is to understand how development communication is used to enhance community participation and support sustainable village development. The research method employed is a case study with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observations, in-depth interviews, and document analysis conducted from November 2024 to January 2025. The analysis was carried out based on the concept of development communication, particularly the aspects of the right to communicate, democratization of communication, and the traditional knowledge system. The

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

findings indicate that the Lamongupa Village Government has effectively implemented development communication in infrastructure development. The village government has provided opportunities for the community to participate in the planning and monitoring of development projects, including the improvement of a 580-meter village road, which has positively impacted accessibility and the local economy. Additionally, integrating cultural values and traditions into development communication has enhanced community acceptance of development policies. This study concludes that the application of inclusive development communication, grounded in local wisdom, can improve the effectiveness of infrastructure development and stimulate village economic growth. These findings highlight the importance of participatory communication in fostering sustainable village development.

Keywords: Development Communication, Infrastructure, Village Development

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan komunikasi pembangunan dalam pembangunan infrastruktur desa oleh Pemerintah Desa Lamongupa, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana komunikasi pembangunan digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang dilakukan dari November 2024 hingga Januari 2025. Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep komunikasi pembangunan, khususnya aspek hak masyarakat untuk berkomunikasi, demokratisasi komunikasi, dan sistem pengetahuan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lamongupa telah menerapkan komunikasi pembangunan secara efektif dalam proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan, termasuk dalam peningkatan jalan desa sepanjang 580 meter yang berdampak pada aksesibilitas dan perekonomian lokal. Selain itu, pelibatan nilai-nilai budaya dan tradisi dalam komunikasi pembangunan membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan komunikasi pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Keberhasilan ini memperlihatkan pentingnya komunikasi yang partisipatif dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan, Infrastruktur, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia (Diah, 2020). Hal itu juga merupakan bagian dari amanat negara untuk mendorong seluruh hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia baik di perkotaan dan perdesaan sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh

masyarakat Indonesia (Syukriyanto, 2021). Saat ini desa berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan yang digulirkan oleh pemerintah baik dari perspektif sektor ekonomi, sosial maupun budaya (Diah, 2020). Namun harus diakui bahwa proses pembangunan perdesaan terkadang mengalami banyak hambatan multidisiplin baik dari faktor SDM yang masih terbatas, aspek kepemimpinan dan lain sebagainya (Azzarah, Mau, & Fatimah, 2025). Padahal banyak literature telah mengulas pentingnya peranan pemerintah desa dalam pembangunan yang dilaksanakan (Akib & Tepare, 2017; Gea, Karo, & Lase, 2023; Simbolon et al., 2021).

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan multisiplin tersebut adalah dengan pendekatan komunikasi pembangunan khususnya komunikasi partisipatif (Tanzil, Juhaepa, Peribadi, Anggraini, & Kasim, 2023; Azzarah et al., 2025; Muchtar, 2016). Komunikasi partisipatif pada awalnya diperkenalkan oleh Paulo Freire di Tahun 1978 yang memfokuskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyuarakan kata-katanya baik secara individual maupun bersama-sama lalu berkembang di Kota Harahe, Zimbabwe yang ditemukan bahwa komunikasi partisipatif adalah pendekatan yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk terlibat pada proses yang mampu memberdayakan masyarakat akar rumput dalam pemenuhan kebutuhannya (Mefalopulos, 2003). Davis (Muchtar, 2016) menyatakan bahwa konsep Komunikasi Partisipatif secara implementasi diterapkan pada kawasan Sub Sahara Afrika khususnya pada sektor pertanian dimana petani harus memberdayakan diri mereka dalam mengelola usaha taninya.

Adapun istilah komunikasi pembangunan pertama kali diperkenakan di Filipina pada tahun 1970 oleh Nora Quebral (Srampickal, 2006) dengan definisi sebagai seni dan ilmu mengenai komunikasi manusia yang digunakan untuk mempercepat perubahan di suatu wilayah dan mengubah orang dari kemiskinan kepada kesetaraan ekonomi yang dinamis yang membuat penduduk bisa mencapai keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan potensi manusia.

Komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi antara seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi mereka. Hal ini bisa dimaknai bahwa komunikasi pembangunan berfungsi untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan pembangunan. Partisipasi ini bisa bersifat informasi, konsultasi, atau bahkan kolaborasi langsung. Partisipasi ini juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti masyarakat diajak untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan kegiatan atau proyek pembangunan, dilibatkan dalam pengawasan

proyek ataupun berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. (Antonius, 2020; Muchtar, 2016). Partisipasi ini terwujud melalui komunikasi, yang memungkinkan pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan secara efektif (Antonius, 2020; Muchtar, 2016).

(Harun & Ardianto, 2011) menjelaskan bahwa tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk memajukan pembangunan, dimana pembangunan sangat membutuhkan masyarakat yang memiliki kapasitas rendah baik dari sisi pendapatan dan kadar hidup harus diberdayakan dan diinformasikan mengenai inovasi, informasi dan kemahiran yang belum mereka ketahui untuk menjadi bahan pemikiran bagi mereka di masa yang akan datang.

Pembahasan mengenai komunikasi pembangunan ini semakin menarik terkait dengan begitu strategisnya berdampak pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena pembangunan memiliki konsep yang melibatkan berbagai aspek dan dimensi yang dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Proses partisipasi masyarakat yang luas dalam perubahan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi pembangunan (Sazali, 2020).

(Srampickal, 2006) meyakini ada tiga hak masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan yaitu hak untuk berkomunikasi (masyarakat berhak mengekspresikan apa yang ia pikir termasuk dalam konteks pembangunan), demokratisasi komunikasi (masyarakat mempunyak hak berkomunikasi termasuk dilibatkan dalam proses komunikasi dari tahap perencanaan hingga ke pengawasan pada pembangunan) serta sistem pengetahuan adat (dimana masyarakat diyakini memiliki basis pengetahuan mereka sendiri dan tentu dapat menjadi agen perubahan yang kuat jika dimanfaatkan).

Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan geliat pertumbuhan yang cukup signifikan terutama dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi (Sjachwary, 2024). Hal itu juga dipertegas oleh data dari BPS Kab. Konawe Kepulauan (Sjachwary, 2024) bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagaimana yang diperlihatkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Konawe Kepulauan

(Tahun 2021-2023)

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Ribu Jiwa)
2021	5.98
2022	5.47
2023	5.44

Sumber : BPS Kab. Konawe Kepulauan (Sjachwary, 2024)

Salah satu desa di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi focus penelitian ini adalah Desa Desa Lamongupa yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Wawonii Tengah. Secara umum luas Kecamatan Wawonii Tengah adalah 14,539 hektar atau 5,84 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Munse. Secara spesifik, Desa Lamonggupa sendiri memiliki persentase luas 28,08 % dari luas Kecamatan Wawonii Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bentuk penerapan komunikasi pembangunan dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa terutama dalam pembangunan infrastruktur sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan akurat (Sugiyono, 2019). Langkah - langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan perpektif komunikasi pembangunan, dengan jenis penelitian studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan tersebut, penulis dapat peneliti secara lebih dalam, mendetail dan komprehensif dalam menggambarkan, menganalisis, mengkonfirmasi data dengan stakeholder terkait. Fokus penelitian adalah penerapan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini telah dilaksanakan dari Bulan November 2024 – Januari 2025 di Desa Lamonggupa Kec.Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Informan penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah Desa Lamonggupa dan Tokoh masyarakat yang akan diuraikan pada Tabel 2 berikut

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Luksan Gnntur	Kaur Pemerintahan
2	Nur Ekawati	Kaur Keuangan
3	Andi Palaloi	Imam Desa

Sumber: Data Primer (2025)

HASIL

Desa Lamonggupa merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kec. Wawonii Tengah yang sedang melakukan pembangunan. Pemerintah Desa menyadari pentingnya pelibatan masyarakat desa baik di tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Hal itu diakui oleh salah seorang informan penelitian, Luksan Guntur (Kaur Pemerintahan Desa Lamonggupa) sebagai berikut

> Saat ini pendekatan pembangunan itu berorientasi kepada masyarakat. Kami menyadari pentingnya pelibatan dan partisipatif masyarakat. Kami pribadi menyadari bahwa ebijakan dan program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, proses pembangunan bisa lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial yang sering muncul dalam pembangunan yang tidak mempertimbangkan suara masyarakat lokal (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025)

Pemerintah Desa Lamonggupa juga meyakini bahwa komunikasi yang efektif akan sangat berguna dalam proses pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nur Ekawati (Kaur Keuangan Desa Lamonggupa) sebagai berikut

> Tentu kita harus pahami bahwa seni dan cara berkomunikasi kita dengan masyarakat tentu harus efektif dan optimal sehingga apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat juga akan diterima dengan baik oleh mereka (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

Beberapa metode komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa dijelaskan oleh Luksan Guntur (Kaur Pemerintahan Desa Lamonggupa) sebagai berikut

> Kami sering menggunakan pertemuan langsung dan forum public dalam menyampaikan maksud kami untuk melibatkan masyarakat. Musrembang adalah salah satu bentuk pertemuan langsung yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan kami menganggap masyarakat adalah bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur di desa (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

Hal itu juga dikuatkan oleh informan penelitian lainnya, Andi Palaloi (Imam Desa) yang menyatakan sebagai berikut

> Kegiatan seperti Musrembang ini sering dilakukan oleh Pemdes yang saya pikir adalah cara berkomunikasi pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Alhamdulillah, saya rasa kalau masyarakat dilibatkan, tentu mereka juga akan bertanggungjawab merawat apa-apa yang telah dibangun selama ini, karena mereka sendiri yang akan merasakan secara langsung (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

Fokus penelitian ini adalah menganalisis mengenai peranan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (Srampickal, 2006) sebagai berikut :

1. Hak masyarakat untuk berkomunikasi

   Aspek ini menekankan bahwa setiap masyarakat berhak dalam mensuarakan apa yang diinginkannya dalam proses pembangunan desa. Secara keseluruhan prinsip ini meyakini bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan berhasil jika setiap individu masyarakat memiliki hak untuk berkomunikasi dalam setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu juga dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian Luksan Guntur (Kaur Pemerintahan Desa Lamonggupa) sebagai berikut

   > Pemdes selalu mendorong setiap masyarakat menyuarakan apa keinginan mereka dalam pembangunan ini. Kami percaya bahwa pembangunan ini, adalah untuk masyarakat dan sebisa mungkin tentu kami harus menampung aspirasi dan suara mereka. Hak mereka

berkomunikasi tentu tidak hanya di acara forum public, tetapi ketika mereka secara pribadi ke Pak Desa atau kami, aparat pemerintah desa (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

2. Demokratisasi Komunikasi

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses komunikasi dari tahap perencanaan kegiatan hingga tahap pengawasan. Hal ini juga sudah diterapkan dalam pengelolaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemdes Lamonggupa berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut

Salah seorang informan penelitian Luksan Guntur (Kaur Pemerintahan Desa Lamonggupa) menyatakan sebagai berikut

Tentu, kami berupaya terus menerus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. Kenapa? Karena kami percaya bahwa masyarakat yang dilibatkan dari awal hingga akhir (dari perencanaan hingga pengawasan) sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

3. Sistem Pengetahuan Adat

Item ini meyakini bahwa masyarakat perlu dilibatkan sebagai agen perubahan dengan basis pengetahuan dan nilai yang mereka yakini dan jalani. Hal itu dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian, Andi Palaloi (Imam Desa) yang menyatakan sebagai berikut

Yang saya rasakan bahwa pemdes paham sekali bahwa masyarakat yang sudah turun temurun hidup disini tentu lebih mengetahui seperti apa yang mereka butuhkan, inginkan dan mungkin mereka akan rasakan. Pemahaman dan pengetahuan seperti itu menurut saya pribadi tidak hanya cara hidup sehari-hari tetap juga prinsip moral, nilai, tradisi dan norma-norma yang harus dilestarikan (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

Hal itu juga dikuatkan oleh informan penelitian lainnya, Luksan Guntur (Kaur Pemerintahan Desa Lamonggupa) menyatakan sebagai berikut

Tentu tanpa adanya partisipasi masyarakat yang aktif, tentu sulit untuk melihat pembangunan ini akan benar-benar menyentuh apa yang mereka inginkan. Sehingga kami juga selalu berusaha menggunakan pendekatan pengetahuan adat dalam pemecahan

masalah sosial yang kadang-kadang terjadi di dalam masyarakat kami (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

Hasil penelitian diatas memperlihatkan bahwa Pemdes Lamonggupa telah mengimplementasikan peranan komunikasi pembangunan sebagaimana mengacu pada teori yang telah dikemukakan oleh (Srampickal, 2006) yang terdiri dari hak untuk berkomunikasi (masyarakat berhak mengekspresikan apa yang ia pikir termasuk dalam konteks pembangunan), demokratisasi komunikasi (masyarakat mempunyak hak berkomunikasi termasuk dilibatkan dalam proses komunikasi dari tahap perencanaan hingga ke pengawasan pada pembangunan) serta sistem pengetahuan adat (dimana masyarakat diyakini memiliki basis pengetahuan mereka sendiri dan tentu dapat menjadi agen perubahan yang kuat jika dimanfaatkan).

Penjelasan terkait penerapan konsep yang dikemukakan oleh (Srampickal, 2006) juga diperkuat oleh dokumentasi yang memperlihatkan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa dalam pembahasan APBDesa dan RKPDesa sebagai salah satu tahapan penunjang dalam pembangunan desa



Gambar 1 a Unsur Pimpinan Desa (Stakeholder) dalam kegiatan Musyawarah Desa Lamonggupa



Gambar 1 b Masyarakat desa diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi mengikuti Musyawarah Desa Lamonggupa

Salah satu topic pembahasan pembangunan desa yang menjadi focus penelitian ini adalah pekerjaan peningkatan ruas jalan sepanjang 580 meter. Proyek pekerjaan ini tentu adalah pekerjaan yang besar dan membutuhkan kerjasama semua pihak sehingga komunikasi yang dibangun harus optimal sehingga masyarakat juga mau terlibat dan dilibatkan dalam pembangunaan ini.

> Hal itu diakui oleh salah seorang informan penelitian, Luksan Guntur (Kaur Pemerintahan Desa Lamonggupa) menyatakan sebagai berikut
>
> Salah satu proyek tahun kemarin yang benar-benar harus kami melinbatkan masyarakat adalah proyek peningkatan status dan ruas jalan. Panjang jalan yang ditingkatkan statusnya itu adalah 580 meter. Tentu kami berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dengan jalan yang semakin baik, tentunya yang merasakan dampaknya langsung adalah mereka duluan. Jalan akses ini kan mempermudah mereka untuk beraktifitas termasuk dalam memasarkan usaha pertanian mereka. (Wawancara tertanggal 10 Januari 2025).

Hal ini bisa terlihat dari salah satu pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa yang melibatkan partisipasi dan menerapkan komunikasi pembangunan yaitu pekerjaan peningkatan jalan desa dengan panjang ruas jalan yang telah ditingkatkan statusnya adalah 580 meter.

Dokumentasi pekerjaan peningkatan ruas jalan di Desa Lamonggupa ini akan terlihat pada Gambar 2 berikut



Gambar 2a Ruas Jalan Desa Lamonggupa (Sebelum ditingkatkan statusnya)



Gambar 2b Ruas Jalan Desa Lamonggupa (Setelah ditingkatkan statusnya)

Pembangunan infrastruktur termasuk peningkatn ruas jalan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah, mendorong berkembangnya sektor lain dan tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan akan tercapai dengan baik (Diah, 2020) ; (Syukriyanto, 2021).

PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Lamonggupa Kec.Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh Negara khususnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota), kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa Lamonggupa beserta masyarakat meyakini bahwa Pembangunan desa adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan perubahan dan kemajuan di berbagai bidang, yang dilaksanakan dalam suatu komunitas hukum tertentu. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, baik melalui swadaya maupun gotong royong, dalam setiap tahap pembangunan yang diinginkan.

Temuan penelitian terkait pelibatan masyarakat juga menegaskan teori yang dikemukakan oleh Sazali (2020) yang meyakini bahwa semakin aktifnya masyarakat berpartisipasi secara luas dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah bentuk dari keberhasilan dan efektifitas komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini telah menganalisis terkait peranan komunikasi pembangunan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (Srampickal, 2006) sebagai berikut :

1. Hak masyarakat untuk berkomunikasi

   Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa Pemerintah Desa Lamonggupa memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat desa untuk berkomunikasi dan menekankan pentingnya akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu masyarakat Desa berhak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi yang relevan dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa guna memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses tersebut. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk berkomunikasi, memberikan masukan, dan mengakses informasi yang relevan, mereka tidak hanya akan lebih terlibat dalam proses pembangunan, tetapi juga akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
2. Demokratisasi komunikasi

   Penelitian menemukan bahwa aspek ini mengarah kepada pemahaman dan penerapan bahwa komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa inklusif dimana melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat akar rumput. Hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka penciptaan ruang dialog yang terbuka dimana setiap suara masyarakat didengar dan dihargai.
3. Sistem Pengetahuan Adat

   Penelitian ini menemukan bahwa aspek ini mengakui pentingnya kearifan lokal dalam komunikasi pembangunan, dimana nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik dalam bentuk tradisi atau adat harus dihormati dand ijadikan bagian ari proses pembangunan

agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hasina & Satyadharma, 2023) yang menegaskan pentingnya pelibatan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat dalam mengintegrasikan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara umum komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa digunakan agar masyarakat desa mengerti dan dapat menerima rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, dimana konteks pembangunan ini tidak selalu dalam pembangunan fisik semata namun juga dapat berupa pembangunan dalam perubahan perilaku masyarakat dan berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagaimana yang dikemukakan oleh (Zahara, 2018) ; Heru (Novianty, 2021). Komunikasi pembangunan sendiri adalah sebuah sarana dalam memahamkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk bersikap menerima perubahan-perubahan yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan sarat akan perubahan nilai dan norma yang mungkin saja belum mudah diterima oleh masyarakat.

Penerapan ketiga aspek ini sudah semaksimal diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa baik dari tahapan perencanaan hingga pengawasan, sehingga diharapkan dapat menciptakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Komunikasi yang berjalan dengan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu akan mendorong kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam merancang, melakukan, mengawasi dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Nindatu, 2019; Permatasari et al., 2024; Sari & Basit, 2018).

Hal ini bisa terlihat dari salah satu pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamonggupa yang melibatkan partisipasi dan menerapkan komunikasi pembangunan yaitu pekerjaan peningkatan jalan desa dengan panjang ruas jalan yang telah ditingkatkan statusnya adalah 580 meter. Pentingnya pekerjaan peningkatan ruas jalan ini karena ruas jalan yang baik akan memberikan dampak yang baik dalam melancarkan mobilitas orang dan barang, membuka keterisolasian wilayah dan berdampak pada pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Gea et al., 2023; Silfiani, Firman, & Azikin, 2021).

Temuan penelitian ini menemukan bahwa ruas jalan yang ditingkatkan ini jalan akses ke pelabuhan rakyat yang tentu saja akan mempermudah akses pengiriman hasil bumi masyarakat di Desa Lamonggupa dan produk luar daerah ke Desa Lamonggupa. Hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Diah, 2020) dan (Hasina & Satyadharma, 2023) yang menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan dirasakan dampak signifikannya oleh masyarakat.

Pembangunan yang melibatkan masyarakat termasuk memberikan kesempatan masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya (memiliki hak berkomunikasi), penerapan aspek demokratisasi komunikasi serta penerapan sistem pengetahuan adat (mengelaborasi nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat) dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa akan cenderung memberikan hasil yang optimal sesuai yang diharapkan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Mahmud, 2007).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Desa Lamongupa sudah menerapkan komunikasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dengan mengimplementasikan hak masyarakat untuk berkomunikasi, menerapkan asas demokratisasi komunikasi serta mengimplementasikan sistem pengetahuan adat. Pemerintah Desa Lamongupa juga meyakini bahwa dengan komunikasi pembangunan yang dilaksanakan secara efektif mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang hasilnya tentu diharapkan maksimal dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, *8*(1), 29–32. http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.221.

Antonius. (2020). Peran Komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Pendidikan. *Procedia Manufacturing*, *18*(2), 285–293. https://doi.org/10.51826/fokus.v18i2.417.

Azzarah, A., Mau, M., & Fatimah, J. M. (2025). Strategi Komunikasi dan Tantangan Dalam Transisi Program Pembangunan di Desa Tumbu Kabupaten Mamuju. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, *12*(1), 57–74. http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v12i1.17257.

Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia : Peluang dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, *2*(2), 165–173. https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45.

Gea, H., Karo, R. K., & Lase, W. M. (2023). Strategi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Hilimbowo Kecamatan Ulugawo. *Jurnal Governance Opinion*, *8*(2), 40–50. https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/3890.

Harun, R., & Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan Kaji Ulang, dan Teori Ktitis*. Jakarta: Rajawali Press.

Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 217–227. https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.167.

Mahmud, A. (2007). *Model Komunikasi Pembangunan dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak*. Universitas Dipenogoro.

Mefalopulos, P. (2003). *Theory and Practice of Participatory Communication (The case of the FAO Project "Communication for Devolopment in Southern Africa")*. The University of Texas.

Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Jurnal Makna.*, *1*(1), 20–32. https://doi.org/10.33558/makna.v1i1.795.

Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Persekptif Komunikatif*, *3*(2), 91–103. https://doi.org/10.24853/pk.3.2.91-103.

Novianty, F. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Implementasi Konsep Smart Environment di Kota Cirebon. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, *25*(1), 85–97. https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i1.160.

Permatasari, S., Fidhara, R., Taufik, N., Hidayat, M. M., El, Z., & Khan, F. N. (2024). Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang. *Jurnal Sahid Da'watii*, *3*(1), 40–46. https://doi.org/10.56406/jurnalsahiddawatii.v3i01.530.

Sari, P. P., & Basit, L. (2018). Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Interaksi*, *2*, 47–60. https://doi.org/10.30596/interaksi.v2i1.1787.

Sazali, H. (2020). *Komunikasi Pembangunan (Aplikasi Kebijakan Publik Pembangunan Agama di Indonesia)*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.

Silfiani, S., Firman, A., & Azikin, T. (2021). Analisis Dampak Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Mataoleo. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, *6*(1), 23. https://doi.org/10.33772/jpw.v6i1.16167.

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(2), 295–302. https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323.

Sjachwary, L. O. M. I. (2024). *Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Wawonii Tmur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan*. Universitas Halu Oleo.

Srampickal, S. J. . (2006). Communication Research Trends In This Issue Development and

Participatory Communication. In *Pontificia* (Vol. 25). Rome: Universitia Gregoriana.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Syukriyanto. (2021). *Pengelolaan Simpul Transportasi Laut di Kabupaten Wakatobi*. Universitas Halu Oleo.

Tanzil, T., Juhaepa, J., Peribadi, P., Anggraini, D., & Kasim, S. S. (2023). Pelatihan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Andomesinggo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. *Indonesian Journal of Community Services*, *2*(1), 50–52. https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.927

Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi dalam Pembangungan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Warta*, *18*(1), 8. https://doi.org/10.46576/wdw.v0i55.213.